



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.655881/2025 tanggal 02 Desember 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



## KEDUA

- : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
  - Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
  - Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
  - Melakukan identifikasi proses utama/ proses bisnis dalam penerapan PIPK;
  - Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
  - Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
  - Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
  - Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
  - Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
  - Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
  - Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- Melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
- Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPA;



- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l. Menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. Tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. Laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan **Januari 2025** sampai dengan **Desember 2025** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabanjahe  
Pada tanggal 20 Januari 2025

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karo

t.t.d

Ekadody

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Dumasari Riamenda Br Surbakti




Lampiran  
Keputusan Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Karo  
Nomor : TAHUN 2025  
Tanggal : 20 Januari 2025  
Tentang : Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian  
Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

TIM PENYUSUN		
No.	NAMA	JABANTAN
1.	EDDY MAHENDRA KETAREN NIP. 19830328 200912 1 002	KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK
2.	BISMI WAHYU RIAN TO NIP. 19921204 202012 1 005	BENDAHARA PENGELUARAN
3.	EKA PRASASTI GINTING	OPERATOR PERSEDIAN, ASET & GLP
4.	SAPRIANTHO V. TARIGAN	STAF KEUANGAN
TIM PENILAI		
No.	NAMA	JABANTAN
1.	EDDY MAHENDRA KETAREN NIP. 19830328 200912 1 002	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK
2.	EKADODY NIP. 19820727 201012 1 006	KASUBBAG. HUKUM & SDM
3.	NIKO ARISTIAN PANGIHUTAN GIRSANG NIP. 19800622 200902 1 002	KASUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
4.	DUMA SARI RIAMEINDA BR SURBAKTI NIP. 19840510 201012 2 003	KASUBBAG. TEKNIS PELAKSANAAN PEMILU & HUPMAS

Ditetapkan di Kabanjahe  
Pada tanggal 20 Januari 2025  
Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Karo

t.t.d  
  
Ekadody

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Dumasari Riamenda Br Surbakti